

**DINAMIKA PEMANFAATAN KRUENG DAROY DALAM TATA RUANG KOTA
BANDA ACEH: SEBUAH ANALISIS KRITIS**

Ammalia Ausana¹, Syarifah Syekha Alatas², Herbina Simamora³, Nova Septiani Purba⁴

^{1,2,3,4}Universitas Samdura

ammaamalia12@gmail.com¹, syekhaalatas3@gmail.com², herbinasimamora75@gmail.com³,
novaseptianipurba20@gmail.com⁴

Abstrak

Krueng Daroy merupakan salah satu elemen ekologi penting yang membelah Kota Banda Aceh dan berperan strategis dalam sistem tata ruang kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemanfaatan Krueng Daroy dalam konteks tata ruang kota dan menilai sejauh mana perencanaan yang ada mampu menjawab tantangan ekologi dan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan analisis kebijakan, ditemukan bahwa revitalisasi kawasan sungai cenderung menekankan aspek estetika dan rekreasi, serta mengabaikan fungsi ekologi dan historisnya. Pelanggaran batas wilayah sungai, pencemaran air, dan lemahnya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara visi perencanaan dan realitas pelaksanaan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan tata ruang yang lebih integratif dan partisipatif untuk memastikan keberlanjutan Krueng Daroy sebagai bagian dari sistem ekologi, sosial, dan budaya Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Tata Ruang, Krueng Daroy, Ekologi Lanskap, Partisipasi Masyarakat, Perkotaan Sungai, Banda Aceh.

Abstract

Krueng Daroy is one of the important ecological elements that divide Banda Aceh City and plays a strategic role in the city's spatial system. This study aims to analyze the dynamics of Krueng Daroy utilization in the context of urban planning and assess the extent to which existing planning is able to respond to ecological and social challenges. Using a qualitative approach through literature studies, field observations, and policy analysis, it was found that the revitalization of the river area tends to emphasize aesthetic and recreational aspects, while

neglecting its ecological and historical functions. River boundary violations, water pollution, and weak community participation show the gap between the planning vision and implementation reality. This study recommends a more integrative and participatory spatial approach to ensure the sustainability of Krueng Daroy as part of the ecological, social and cultural systems of Banda Aceh City.

Keywords: *Urban Planning, Krueng Daroy, Landscape Ecology, Community Participation, River Urban, Banda Aceh.*

PENDAHULUAN

Krueng Daroy merupakan salah satu sungai utama yang mengalir di tengah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur drainase alami, tetapi juga memiliki nilai historis dan kultural bagi masyarakat Banda Aceh. Dalam sejarahnya, sungai ini menjadi bagian dari sistem perairan Kesultanan Aceh, yang menghubungkan istana dengan berbagai titik strategis di kota (Yulizar, 2020). Dengan demikian, keberadaan Krueng Daroy tidak sekadar sebagai elemen fisik, tetapi juga simbol identitas dan warisan kota.

Dalam konteks perencanaan tata ruang, sungai memiliki peran yang kompleks. Ia berfungsi sebagai koridor ekologis, pengendali banjir, sekaligus potensi ruang publik yang dapat mendukung kualitas hidup warga kota. Di banyak kota dunia, sungai telah direvitalisasi menjadi ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan jaringan ekologis dan sistem transportasi ramah lingkungan (Forman, 1995). Krueng Daroy, dengan potensinya, seharusnya mendapat perhatian lebih dalam kebijakan tata ruang Kota Banda Aceh agar mampu memenuhi fungsi ekologis dan sosial secara berimbang.

Namun, dinamika pembangunan kota yang pesat dalam dua dekade terakhir menimbulkan tekanan besar terhadap kawasan sempadan sungai. Alih fungsi lahan, pembangunan permukiman tanpa perencanaan terpadu, serta pembuangan limbah domestik langsung ke sungai menjadi penyebab utama menurunnya kualitas lingkungan Krueng Daroy (Bappeda Banda Aceh, 2021). Selain itu, lemahnya penegakan regulasi terhadap kawasan sempadan sungai menyebabkan degradasi fungsi ekologis terus berlangsung tanpa kontrol yang memadai.

Di sisi lain, upaya revitalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, seperti pembangunan Taman Krueng Daroy, menunjukkan adanya inisiatif untuk

mengintegrasikan sungai ke dalam lanskap kota. Namun, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat fisik dan estetis semata, belum menyentuh pada aspek keberlanjutan jangka panjang, seperti pemulihan ekosistem dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan (Putri, 2022). Padahal, pendekatan tata ruang berkelanjutan menuntut adanya sinergi antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana dinamika pemanfaatan Krueng Daroy dalam konteks tata ruang Kota Banda Aceh. Penelitian ini akan menguraikan permasalahan yang muncul dalam proses pemanfaatan, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan tata ruang yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul rekomendasi yang mampu mendorong perencanaan ruang kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pembangunan kota ramah lingkungan dan berbasis partisipasi.

KAJIAN TEORI

A. Teori Tata Ruang Kota

Tata ruang kota merupakan bentuk pengaturan struktur ruang yang meliputi susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana, serta pola ruang berupa peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, keberadaan unsur alamiah seperti sungai menjadi salah satu komponen penting yang harus diperhitungkan secara integral dalam penyusunan rencana tata ruang.

Dalam konteks perkotaan, sungai tidak hanya berfungsi sebagai saluran drainase atau sumber air, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekologis kota. Sungai dapat berperan sebagai koridor ekologis yang menghubungkan ruang terbuka hijau dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Hudalah dan Woltjer (2007) menekankan bahwa pendekatan tata ruang modern harus mengintegrasikan fungsi ekologis sungai ke dalam sistem perencanaan spasial kota, bukan sekadar memperlakukannya sebagai objek teknis yang harus dikendalikan.

Lebih lanjut, badan air seperti sungai dapat memiliki nilai multifungsi dalam perencanaan kota. Selain fungsi hidrologis sebagai penampung dan pengalir air hujan, sungai juga memiliki

fungsi sosial dan budaya. Di beberapa kota, sungai menjadi ruang interaksi publik, tempat kegiatan ekonomi informal, bahkan simbol identitas lokal. Oleh karena itu, pendekatan tata ruang yang mengabaikan fungsi-fungsi sosial-budaya sungai cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak berkelanjutan dan kurang berpihak pada masyarakat setempat (Forman, 1995).

Perkembangan teori tata ruang dalam dua dekade terakhir juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan teknokratik ke arah pendekatan holistik dan partisipatif. Ini berarti bahwa perencanaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau ahli teknis, tetapi juga melibatkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan langsung terhadap ruang. Dalam kerangka ini, sungai dalam kota—termasuk Krueng Daroy—harus diposisikan sebagai subjek perencanaan yang hidup, yang membutuhkan perlindungan, pengelolaan kolaboratif, dan kebijakan tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan ekologis dan keadilan spasial.

B. Pendekatan Ekologi Lanskap dan Perencanaan Partisipatif

Pendekatan ekologi lanskap lahir dari kesadaran akan pentingnya hubungan antara struktur ruang fisik dan proses ekologis yang berlangsung di dalamnya. Menurut Forman (1995), tata ruang seharusnya mempertimbangkan mosaik lanskap yang terdiri dari elemen alami (seperti sungai, hutan, dan rawa) serta elemen buatan manusia (permukiman, infrastruktur, dan lahan pertanian) dalam suatu kesatuan yang saling berinteraksi. Dalam konteks ini, sungai seperti Krueng Daroy tidak dapat dipandang sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai bagian dari jaringan ekologis kota yang berfungsi dalam menjaga kualitas air, habitat biodiversitas, serta keseimbangan iklim mikro lokal.

Pendekatan ini mengharuskan perencanaan tata ruang untuk mengintegrasikan konservasi alam dengan pembangunan. Sungai yang ditata hanya dari aspek teknis seperti normalisasi atau betonisasi cenderung kehilangan fungsi ekologis alaminya. Sebaliknya, penerapan prinsip-prinsip ekologi lanskap memungkinkan sungai tetap menjalankan fungsinya sebagai koridor ekologis sambil mendukung fungsi sosial dan estetis. Dalam kasus Krueng Daroy, penting untuk mempertahankan vegetasi alami di sempadan sungai dan mengurangi aktivitas yang merusak integritas ekologis kawasan tersebut.

Sementara itu, pendekatan partisipatif dalam perencanaan kota menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan, mulai dari perumusan visi hingga pengawasan implementasi kebijakan. Healey (1997) menyatakan bahwa partisipasi publik

bukan sekadar bentuk konsultasi, tetapi proses deliberatif di mana warga memiliki suara yang setara dalam menentukan arah pembangunan ruang. Melibatkan masyarakat sekitar Krueng Daroy dalam perencanaan akan meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*), memperkuat kontrol sosial terhadap pelanggaran ruang, serta menjamin bahwa perencanaan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, perpaduan antara pendekatan ekologi lanskap dan partisipatif menjadi landasan penting dalam perencanaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan.

1. Penguatan Fungsi Ekologis Melalui Rehabilitasi Lanskap

Salah satu strategi penting dalam penerapan pendekatan ekologi lanskap adalah rehabilitasi atau restorasi kawasan sempadan sungai. Rehabilitasi ini mencakup penanaman kembali vegetasi lokal, pengendalian erosi, serta pemulihan habitat alami bagi flora dan fauna. Pada Krueng Daroy, intervensi semacam ini dapat mengurangi dampak limpasan air hujan, meningkatkan kualitas udara dan air, serta memberikan ruang hidup bagi keanekaragaman hayati lokal. Fungsi ekologis ini sangat penting untuk menjadikan sungai sebagai penyerap tekanan lingkungan dari urbanisasi di sekitarnya.

2. Integrasi Pengetahuan Lokal dalam Perencanaan

Pendekatan partisipatif yang efektif tidak hanya melibatkan warga sebagai responden, tetapi juga mengakui pengetahuan lokal (*local knowledge*) sebagai sumber informasi yang valid. Warga yang tinggal di sekitar Krueng Daroy selama puluhan tahun memiliki pemahaman tentang pola banjir, musim perubahan debit air, serta lokasi-lokasi yang rawan longsor atau erosi. Mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam perencanaan memungkinkan solusi yang lebih kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, hal ini memperkuat legitimasi proses perencanaan di mata masyarakat.

3. Kolaborasi Multistakeholder dalam Pengelolaan Sungai

Pengelolaan sungai tidak dapat dibebankan pada satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi lintas aktor—pemerintah, akademisi, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil—untuk menciptakan tata kelola sungai yang efektif dan adil. Kolaborasi ini mencakup pembagian peran yang jelas, kesepakatan bersama tentang visi pengelolaan sungai, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi bersama. Dalam konteks Krueng Daroy, kolaborasi ini penting untuk menghindari konflik kepentingan, memperkuat sinergi kebijakan, dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, budaya, dan ekologis yang terjadi di sepanjang Sungai Krueng Daroy. Studi kasus dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi konteks lokal secara menyeluruh dan mendalam, terutama dalam hal bagaimana masyarakat dan institusi pemerintah berinteraksi dengan ruang sungai di tengah kota.

Lokasi penelitian difokuskan di kawasan bantaran Sungai Krueng Daroy yang melintasi wilayah Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih secara purposive karena dinilai representatif dalam menunjukkan dinamika pemanfaatan dan pengelolaan sungai dalam ruang perkotaan, baik dari aspek sosial, lingkungan, maupun tata ruang.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama. Pertama, studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai teori-teori dan temuan sebelumnya yang relevan, termasuk literatur tentang pengelolaan sungai perkotaan, konsep ruang publik, serta pendekatan partisipatif dalam tata ruang. Sumber literatur mencakup jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen perencanaan kota.

Kedua, dilakukan observasi lapangan secara langsung untuk mendokumentasikan kondisi fisik, pola aktivitas masyarakat, serta perubahan yang terjadi di sekitar sungai. Observasi ini bersifat partisipatif dan berlangsung selama beberapa minggu untuk menangkap dinamika harian dan mingguan, termasuk aktivitas ekonomi informal, rekreasi, dan interaksi sosial yang terjadi di lokasi tersebut.

Ketiga, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sungai. Narasumber utama meliputi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh, serta warga lokal yang tinggal atau beraktivitas di sekitar sungai. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan harapan masing-masing informan terhadap pengelolaan Krueng Daroy.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-kritis, yang bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya, tetapi juga mengkaji secara kritis

hubungan antara aktor, kebijakan, dan dampaknya terhadap ruang sungai. Triangulasi sumber diterapkan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, dengan cara membandingkan temuan dari berbagai sumber data (literatur, observasi, dan wawancara) guna memastikan konsistensi dan kedalaman informasi.

Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang holistik mengenai bagaimana Krueng Daroy dipahami, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai bagian integral dari lanskap kota, serta bagaimana aktor-aktor lokal berkontribusi terhadap perubahan dan pemeliharaan ruang sungai tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai contoh, negara-negara dengan tingkat korupsi rendah seperti Selandia Baru dan Finlandia menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah. Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi seperti Sudan atau Venezuela menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan politik yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan bernegara harus menjadi prioritas bagi setiap individu, terutama pemimpin. Pemerintah juga harus memperkuat pendidikan moral dan penegakan hukum untuk mencegah munculnya akhlak tidak terpuji dalam masyarakat.

Pemanfaatan Krueng Daroy dalam tata ruang Kota Banda Aceh saat ini mencerminkan pergeseran fungsi sungai dari sistem ekologis menjadi objek visual dan rekreasi kota. Revitalisasi yang dilakukan sejak tahun 2015 telah mengubah kawasan bantaran sungai menjadi lebih estetis, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan ekologis seperti pencemaran dan degradasi habitat (Fadli, 2020).

Salah satu capaian revitalisasi adalah pengembangan Taman Krueng Daroy sebagai ruang terbuka publik yang ramai dikunjungi. Fungsi sosial sungai mengalami peningkatan, terutama sebagai tempat bersantai, berolahraga, dan berkumpul masyarakat. Namun, elemen ekologis seperti vegetasi peneduh alami belum menjadi prioritas utama dalam desain ruang publik tersebut (Nasution & Putri, 2022).

Bangunan permanen yang melanggar sempadan sungai masih banyak ditemukan, terutama di kawasan padat penduduk. Padahal, Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 telah mengatur sempadan sungai minimum lima meter dari tepi sungai di daerah perkotaan. Lemahnya

pengawasan tata ruang menyebabkan pelanggaran ini terus berlanjut (Bappeda Banda Aceh, 2021).

Limbah rumah tangga masih menjadi salah satu sumber utama pencemaran sungai. Tidak adanya sistem pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi menyebabkan limbah cair langsung dibuang ke sungai. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas air dan meningkatnya potensi penyakit akibat air tercemar (Yuliana, 2019).

Dari segi kebijakan, dokumen RTRW Banda Aceh belum menunjukkan integrasi penuh terhadap fungsi ekologis sungai. Krueng Daroy belum dikategorikan sebagai kawasan lindung ekologis, sehingga tidak ada strategi khusus perlindungan sungai dalam rencana zonasi tata ruang (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018).

Meskipun dalam perencanaan kota telah disebutkan pengembangan ruang hijau berbasis air, pada praktiknya pengembangan tersebut cenderung simbolis. Proyek infrastruktur seperti pembangunan jembatan dan taman kota lebih diutamakan dibandingkan dengan restorasi ekologis seperti penanaman kembali vegetasi riparian (Rahman & Sari, 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan masih bersifat top-down. Dalam wawancara lapangan, warga menyebut bahwa revitalisasi dilakukan tanpa adanya konsultasi mendalam dengan masyarakat sekitar. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip perencanaan partisipatif yang menekankan kolaborasi aktif antara perencana dan masyarakat (Healey, 1997; Azwar, 2021).

Minimnya forum dialog antara pemangku kepentingan menyebabkan keterbatasan informasi publik tentang rencana pengelolaan sungai. Hal ini menciptakan ketimpangan pengetahuan dan melemahkan kontrol sosial terhadap pembangunan di sekitar sungai (Syahrial et al., 2020).

Pendekatan ekologi lanskap menekankan pentingnya konektivitas antara elemen alam seperti sungai, vegetasi, dan ruang terbuka. Saat ini, struktur lanskap Krueng Daroy belum dirancang sebagai koridor ekologis karena vegetasi sepanjang sempadan masih terbatas dan tidak terhubung antar kawasan (Forman, 1995; Lubis, 2022).

Fungsi budaya sungai sebagai bagian dari identitas masyarakat Aceh juga belum terakomodasi dalam penataan ruang. Krueng Daroy memiliki nilai sejarah dan spiritual, namun penguatan aspek budaya tersebut belum menjadi bagian dari visi perencanaan kawasan (Rasyid, 2017).

Secara umum, dinamika pemanfaatan Krueng Daroy menunjukkan ketimpangan antara wacana pembangunan berkelanjutan dan praktik kebijakan ruang. Fungsi ekologis sering dikalahkan oleh fungsi visual dan ekonomi, sehingga arah pembangunan menjadi kurang holistik (Hudalah & Woltjer, 2007; Utami & Prasetyo, 2021).

Perlu ada reformulasi pendekatan tata ruang yang transformatif dan berbasis masyarakat. Ini mencakup penegakan aturan sempadan, pemulihan fungsi ekologis, dan keterlibatan publik yang lebih inklusif agar Krueng Daroy dapat difungsikan optimal sebagai bagian penting dari sistem ekologis dan sosial kota (Healey, 1997; Fadli, 2020).

1. Ketidaksinkronan Antar Kebijakan Sektor

Salah satu hambatan besar dalam pengelolaan Krueng Daroy adalah kurangnya sinkronisasi antara kebijakan tata ruang, lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, meskipun RTRW menyebutkan perlunya pengembangan ruang hijau dan pengendalian kawasan sempadan, proyek-proyek fisik yang dilaksanakan di lapangan seperti pembangunan taman atau pelebaran jalan justru sering mengorbankan vegetasi alami dan mendekati sempadan sungai. Ketidakharmonisan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarsektor dan perlunya harmonisasi regulasi lintas instansi (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018; Bappeda Banda Aceh, 2021).

Ketidaksinkronan antar kebijakan sektor menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola ruang di banyak kota, termasuk Banda Aceh. Dalam kasus Krueng Daroy, perencanaan tata ruang yang tertuang dalam RTRW telah menetapkan pentingnya kawasan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau dan zona lindung. Namun, implementasi di lapangan sering kali bertolak belakang. Misalnya, pembangunan fasilitas publik seperti taman, trotoar, atau infrastruktur jalan kerap dilakukan terlalu dekat dengan sempadan sungai, bahkan mengorbankan vegetasi alami yang menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas ekosistem sungai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan secara teoritis sudah mengarah pada keberlanjutan, praktik sektoral belum mengikuti prinsip yang sama.

Lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi salah satu penyebab utama ketidaksinkronan tersebut. Instansi yang menangani infrastruktur lebih sering menekankan pada aspek estetika dan aksesibilitas, sementara dinas lingkungan hidup memiliki kepentingan untuk menjaga daya dukung ekologis kawasan sungai. Sayangnya, agenda masing-masing sektor berjalan sendiri tanpa pertemuan koordinatif yang kuat. Ketika kebijakan pembangunan jalan atau taman tidak

diselaraskan dengan prinsip perlindungan ekologis, maka sungai menjadi korban dari pendekatan sektoral yang parsial. Hal ini juga memperlihatkan lemahnya lembaga pengarah tata ruang yang seharusnya mengintegrasikan visi antarinstansi melalui regulasi yang mengikat dan mekanisme pengawasan yang tegas.

Konsekuensi dari ketidaksinkronan ini tidak hanya terlihat pada degradasi fisik sungai, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan. Masyarakat menjadi bingung terhadap batasan legal pemanfaatan ruang karena seringkali melihat proyek pemerintah sendiri yang melanggar aturan sempadan. Akibatnya, legitimasi kebijakan tata ruang di mata publik menurun, dan masyarakat merasa tidak perlu menaati regulasi yang tampak inkonsisten. Dalam wawancara lapangan, beberapa warga mengungkapkan bahwa mereka mengikuti pola pembangunan pemerintah sebagai acuan, bahkan ketika hal itu melanggar aturan sempadan sungai. Ini menciptakan siklus pelanggaran ruang yang sulit dikendalikan.

Dampak jangka panjang dari kebijakan yang tidak sinkron adalah melemahnya ketahanan ekologis dan meningkatnya kerentanan terhadap bencana. Tanpa vegetasi sempadan yang cukup, sungai kehilangan kapasitasnya untuk menyerap limpasan air hujan, memperbesar potensi banjir dan erosi. Infrastruktur yang dibangun terlalu dekat dengan sungai juga rentan rusak saat terjadi kenaikan debit air atau abrasi sempadan. Jika tidak segera diatasi, ketidakharmonisan kebijakan ini akan memperburuk kondisi lingkungan, menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan, dan menambah beban biaya pemulihan di masa mendatang.

Untuk itu, diperlukan upaya sistematis dalam membangun integrasi kebijakan antar sektor. Salah satu langkah strategis adalah memperkuat fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagai lembaga lintas sektor yang memiliki kewenangan menyatukan visi, menyelaraskan program, dan mengawasi implementasi tata ruang secara menyeluruh. Selain itu, perumusan kebijakan baru sebaiknya melalui mekanisme lintas sektor yang transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil. Harmonisasi ini menjadi syarat mutlak agar pengelolaan sungai seperti Krueng Daroy dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan kota yang ekologis, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik secara luas.

2. Kesenjangan Antara Retorika dan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

Dalam dokumen perencanaan dan wacana pembangunan, istilah “berkelanjutan” kerap

digunakan. Namun, dalam praktiknya, prinsip pembangunan berkelanjutan masih bersifat retorik dan belum mewujud dalam indikator nyata seperti perlindungan biodiversitas, pengelolaan limbah terpadu, atau pengendalian pencemaran. Proyek revitalisasi cenderung lebih mengedepankan hasil yang terlihat (*visible outcome*) daripada dampak ekologis jangka panjang. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem evaluasi proyek agar tidak hanya mengukur output fisik, tetapi juga outcome ekologis dan sosial (Rahman & Sari, 2020).

Kesenjangan antara retorika dan implementasi pembangunan berkelanjutan terlihat jelas dalam proyek-proyek perkotaan, termasuk revitalisasi Krueng Daroy. Meskipun dalam berbagai dokumen kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah lokal sering menyebut pentingnya prinsip keberlanjutan, praktik di lapangan lebih fokus pada aspek estetika dan ekonomi. Misalnya, pembangunan taman kota di sepanjang Krueng Daroy memang mempercantik visual kawasan dan menarik wisatawan, namun tidak diikuti oleh tindakan konkret untuk meningkatkan kualitas air atau memperbaiki habitat flora-fauna lokal. Hal ini mencerminkan dominasi orientasi jangka pendek dan pencitraan politik atas tujuan ekologis yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.

Ketimpangan ini juga terlihat dalam sistem evaluasi dan indikator keberhasilan proyek. Banyak program revitalisasi dinilai sukses hanya berdasarkan jumlah kunjungan masyarakat, nilai estetika, atau peningkatan nilai properti di sekitar kawasan. Padahal, keberhasilan sejati dalam konteks berkelanjutan seharusnya mencakup indikator ekologis seperti peningkatan tutupan vegetasi, perbaikan indeks kualitas air, atau bertambahnya keanekaragaman hayati lokal. Tanpa indikator yang mencerminkan dimensi ekologis dan sosial, proyek yang secara visual tampak berhasil bisa jadi justru menyumbang pada degradasi lingkungan jangka panjang.

Selain itu, tidak adanya audit lingkungan pascarevitalisasi menjadi celah besar yang memperparah kesenjangan antara wacana dan praktik. Dalam kasus Krueng Daroy, belum ada studi pascaprojek yang secara transparan mengevaluasi dampak revitalisasi terhadap fungsi ekosistem sungai. Kurangnya monitoring ini menyebabkan pengambilan keputusan ke depan tidak berbasis data lingkungan yang akurat, melainkan sekadar melanjutkan pendekatan serupa tanpa perbaikan metodologis. Reformasi dibutuhkan untuk mewajibkan evaluasi lingkungan sebagai bagian dari siklus kebijakan pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif yang dilupakan setelah proyek rampung.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, penting dilakukan pergeseran paradigma dari

pembangunan berbasis proyek ke pembangunan berbasis sistem ekologis dan sosial. Artinya, setiap intervensi fisik di ruang publik seperti di sepanjang Krueng Daroy harus dipandang sebagai bagian dari sistem kota yang kompleks, yang saling terkait antara aspek ekologis, sosial, dan budaya. Pendekatan semacam ini akan mendorong desain dan pelaksanaan proyek yang lebih holistik dan akuntabel. Jika prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar diinternalisasi dalam kebijakan dan praktik, maka revitalisasi sungai tidak hanya akan menghasilkan ruang kota yang indah, tetapi juga sehat secara ekologis dan inklusif secara sosial.

3. Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Pascapembangunan

Setelah proyek revitalisasi selesai, pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial sering kali berhenti. Tidak ada sistem evaluasi berkala yang mengukur apakah kualitas air sungai membaik, apakah vegetasi sempadan bertahan, atau apakah masyarakat merasakan manfaat jangka panjang dari ruang publik tersebut. Minimnya evaluasi ini membuka ruang bagi kerusakan kembali, penyimpangan fungsi lahan, serta hilangnya keberlanjutan program. Untuk itu, penguatan sistem monitoring berbasis komunitas dapat menjadi solusi, di mana warga dilibatkan sebagai pengawas lokal terhadap perubahan di sekitar sungai (Syahrial et al., 2020).

Minimnya pemantauan pascarevitalisasi menjadi celah besar dalam siklus perencanaan dan pengelolaan ruang kota. Dalam kasus Krueng Daroy, setelah proyek revitalisasi rampung dan fasilitas publik mulai digunakan, tidak ada mekanisme rutin yang menilai dampak jangka panjang terhadap lingkungan atau kesejahteraan masyarakat. Fungsi sungai sebagai ekosistem hidup kembali terabaikan, dan perhatian publik maupun institusi bergeser ke proyek baru lainnya. Tanpa pengawasan berkelanjutan, hasil pembangunan cenderung mengalami degradasi seiring waktu, mengakibatkan kembalinya persoalan seperti pencemaran air, kerusakan bantaran, dan okupansi liar.

Evaluasi yang semestinya menjadi tahap penting dalam siklus proyek justru sering dipandang sebagai formalitas belaka. Padahal, evaluasi pascapembangunan memiliki peran krusial dalam mendeteksi kesenjangan antara rencana dan kenyataan. Misalnya, apakah ruang terbuka hijau benar-benar digunakan oleh kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia? Apakah taman dan jalur pedestrian tetap bersih dan aman? Atau apakah sungai menjadi lebih sehat dari sisi kualitas air dan keanekaragaman hayati? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab tanpa sistem evaluasi yang dirancang dengan baik dan dijalankan secara berkala.

Kurangnya evaluasi juga berdampak pada lemahnya akuntabilitas pengelola proyek. Bila

tidak ada indikator kinerja yang jelas pascaprojek, maka sulit untuk menilai keberhasilan secara objektif. Hal ini membuka peluang bagi proyek-proyek pembangunan yang tidak berkelanjutan untuk terus direplikasi di lokasi lain, hanya demi kepentingan politik atau pencitraan estetika kota. Lebih parah lagi, tanpa evaluasi, masyarakat tidak memiliki dasar untuk melakukan kritik atau partisipasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan di masa depan.

Solusi yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan *community-based monitoring* atau pemantauan berbasis masyarakat. Dalam pendekatan ini, warga lokal dilatih untuk melakukan observasi berkala terhadap kondisi sungai, termasuk kualitas air, kebersihan kawasan, serta perilaku pengguna ruang publik. Melibatkan komunitas tidak hanya memperluas kapasitas pengawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap ruang bersama. Inisiatif ini dapat bekerja sama dengan sekolah, lembaga swadaya masyarakat, atau komunitas pecinta lingkungan lokal, sehingga monitoring tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Agar pendekatan ini berjalan efektif, perlu dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah daerah. Misalnya, dengan membentuk forum warga bantaran sungai yang difasilitasi oleh dinas lingkungan atau Bappeda, serta menyediakan platform pelaporan digital yang sederhana. Data dari warga dapat dikompilasi sebagai bagian dari evaluasi kebijakan tata ruang kota dan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan RTRW berikutnya. Dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang berbasis komunitas, proyek revitalisasi seperti Krueng Daroy memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberlanjutan yang sesungguhnya, baik secara ekologis maupun sosial.

4. Potensi Sungai sebagai Sarana Pendidikan Lingkungan

Krueng Daroy juga memiliki potensi besar sebagai sarana edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Sayangnya, potensi ini belum dimaksimalkan dalam bentuk program pendidikan lingkungan hidup berbasis sungai, baik di sekolah, kampus, maupun komunitas lokal. Padahal, melalui kegiatan seperti *eco-walk*, pengamatan biota air, atau pengenalan vegetasi riparian, masyarakat dapat diajak memahami fungsi ekologis sungai secara langsung. Pendekatan ini terbukti efektif di beberapa kota dunia dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan perairan.

Minimnya pemantauan pascarevitalisasi menjadi celah besar dalam siklus perencanaan dan pengelolaan ruang kota. Dalam kasus Krueng Daroy, setelah proyek revitalisasi rampung

dan fasilitas publik mulai digunakan, tidak ada mekanisme rutin yang menilai dampak jangka panjang terhadap lingkungan atau kesejahteraan masyarakat. Fungsi sungai sebagai ekosistem hidup kembali terabaikan, dan perhatian publik maupun institusi bergeser ke proyek baru lainnya. Tanpa pengawasan berkelanjutan, hasil pembangunan cenderung mengalami degradasi seiring waktu, mengakibatkan kembalinya persoalan seperti pencemaran air, kerusakan bantaran, dan okupansi liar.

Evaluasi yang semestinya menjadi tahap penting dalam siklus proyek justru sering dipandang sebagai formalitas belaka. Padahal, evaluasi pascapembangunan memiliki peran krusial dalam mendeteksi kesenjangan antara rencana dan kenyataan. Misalnya, apakah ruang terbuka hijau benar-benar digunakan oleh kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia? Apakah taman dan jalur pedestrian tetap bersih dan aman? Atau apakah sungai menjadi lebih sehat dari sisi kualitas air dan keanekaragaman hayati? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab tanpa sistem evaluasi yang dirancang dengan baik dan dijalankan secara berkala.

Kurangnya evaluasi juga berdampak pada lemahnya akuntabilitas pengelola proyek. Bila tidak ada indikator kinerja yang jelas pascaprojek, maka sulit untuk menilai keberhasilan secara objektif. Hal ini membuka peluang bagi proyek-proyek pembangunan yang tidak berkelanjutan untuk terus direplikasi di lokasi lain, hanya demi kepentingan politik atau pencitraan estetika kota. Lebih parah lagi, tanpa evaluasi, masyarakat tidak memiliki dasar untuk melakukan kritik atau partisipasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan di masa depan.

Solusi yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan *community-based monitoring* atau pemantauan berbasis masyarakat. Dalam pendekatan ini, warga lokal dilatih untuk melakukan observasi berkala terhadap kondisi sungai, termasuk kualitas air, kebersihan kawasan, serta perilaku pengguna ruang publik. Melibatkan komunitas tidak hanya memperluas kapasitas pengawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap ruang bersama. Inisiatif ini dapat bekerja sama dengan sekolah, lembaga swadaya masyarakat, atau komunitas pecinta lingkungan lokal, sehingga monitoring tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Agar pendekatan ini berjalan efektif, perlu dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah daerah. Misalnya, dengan membentuk forum warga bantaran sungai yang difasilitasi oleh dinas lingkungan atau Bappeda, serta menyediakan platform pelaporan digital yang sederhana. Data dari warga dapat dikompilasi sebagai bagian dari evaluasi kebijakan tata ruang kota dan menjadi

bahan pertimbangan untuk penyusunan RTRW berikutnya. Dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang berbasis komunitas, proyek revitalisasi seperti Krueng Daroy memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberlanjutan yang sesungguhnya, baik secara ekologis maupun sosial.

5. Kurangnya Perhatian pada Ketahanan Iklim Kota

Kondisi ekologis Krueng Daroy sangat erat kaitannya dengan ketahanan iklim Kota Banda Aceh. Namun, fungsi sungai sebagai penyerap risiko bencana (seperti banjir) belum sepenuhnya dioptimalkan. Drainase perkotaan masih sangat bergantung pada aliran sungai, sementara kapasitas tampung dan area resapan semakin menyempit akibat alih fungsi lahan dan betonisasi. Oleh karena itu, penguatan peran Krueng Daroy sebagai elemen adaptasi iklim harus menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko bencana kota yang lebih komprehensif (Forman, 1995; Lubis, 2022).

Krueng Daroy memiliki potensi besar sebagai infrastruktur hijau alami yang mampu meningkatkan ketahanan iklim Kota Banda Aceh, terutama dalam menghadapi intensifikasi curah hujan dan ancaman banjir. Namun, peran ini belum dimaksimalkan karena perencanaan tata ruang kota masih didominasi oleh pendekatan teknis yang kurang memperhatikan kapasitas adaptif lingkungan alami. Sungai yang seharusnya berperan sebagai penyangga ekologis, saat ini lebih difungsikan sebagai elemen estetika kota, dengan modifikasi struktur bantaran yang kaku dan minim area resapan.

Alih fungsi lahan di sekitar Krueng Daroy, khususnya menjadi area komersial dan pemukiman padat, telah mempersempit wilayah tampungan alami air hujan. Selain itu, permukaan kedap air seperti aspal dan beton mempercepat aliran permukaan dan meningkatkan risiko limpasan. Akibatnya, ketika hujan deras terjadi, air cepat meluap karena sungai tidak mampu menampung debit tambahan. Padahal, dalam perencanaan berbasis ketahanan iklim, penting untuk menyediakan ruang banjir (flood plain) yang memungkinkan sungai meluap secara terkontrol tanpa merusak infrastruktur atau mengancam keselamatan warga.

Restorasi vegetasi riparian (vegetasi alami di sepanjang tepi sungai) adalah salah satu langkah penting dalam memperkuat ketahanan iklim kota. Vegetasi ini berfungsi menyerap air hujan, mengurangi erosi, dan memperlambat aliran permukaan. Sayangnya, banyak vegetasi alami di sepanjang Krueng Daroy telah diganti dengan elemen beton atau taman hias yang kurang efektif dalam menyerap air. Oleh karena itu, strategi penataan ulang kawasan sempadan

dengan mengutamakan fungsi ekologis—bukan hanya keindahan visual—perlu menjadi agenda prioritas dalam mitigasi risiko perubahan iklim.

Perubahan iklim juga membawa dampak pada peningkatan suhu udara kota (urban heat island), yang dapat dikurangi melalui integrasi elemen biru (sungai) dan hijau (vegetasi) secara sinergis. Krueng Daroy dapat dijadikan koridor mikroklimat yang menyejukkan kawasan kota bila dikelola dengan pendekatan ekologi lanskap. Jalur hijau sepanjang sungai yang terkoneksi dengan ruang terbuka hijau lainnya akan menciptakan sistem penyeimbang suhu yang membantu adaptasi terhadap pemanasan global. Namun hingga kini, keterkaitan antara perencanaan ruang dan isu perubahan iklim masih lemah dalam dokumen-dokumen resmi kota.

Integrasi ketahanan iklim dalam pengelolaan sungai juga perlu diwujudkan dalam bentuk instrumen kebijakan, seperti insentif bagi pengelolaan ruang sempadan berbasis konservasi, atau disinsentif bagi praktik pembangunan yang merusak daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah perlu menyusun climate resilience action plan yang mencakup sungai sebagai infrastruktur adaptif, bukan sekadar saluran pembuangan. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan nature-based solutions (NBS) yang kini banyak diterapkan di berbagai kota dunia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Akhirnya, pendekatan ketahanan iklim dalam pengelolaan Krueng Daroy harus bersifat lintas-sektor dan berbasis data. Diperlukan kolaborasi antara dinas lingkungan hidup, PUPR, Bappeda, serta komunitas lokal untuk membangun sistem informasi spasial yang mampu memetakan area rawan bencana, kapasitas resapan, dan kondisi vegetasi. Dengan pendekatan berbasis data dan partisipatif, ketahanan iklim kota dapat diwujudkan secara nyata, dan Krueng Daroy dapat memainkan peran strategisnya sebagai sistem penyangga ekologis dan sosial kota Banda Aceh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Krueng Daroy merupakan salah satu sungai penting yang mengalir di jantung Kota Banda Aceh, memiliki nilai strategis tidak hanya dari sisi ekologis, tetapi juga historis, sosial, dan budaya. Dalam konteks tata ruang kota, sungai ini memainkan peran vital sebagai elemen alami yang mendukung sistem drainase, penyedia air, serta potensi pengembangan ruang publik dan pariwisata. Artikel ini menunjukkan bahwa dinamika pemanfaatan Krueng Daroy mengalami

berbagai tantangan, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur kota yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pemanfaatan Krueng Daroy mengalami pergeseran fungsi, dari awalnya sebagai sumber kehidupan masyarakat dan elemen penting dalam struktur ekologis kota, menjadi ruang yang terpinggirkan akibat alih fungsi lahan, pencemaran air, serta pembangunan yang tidak terkendali di sekitar kawasan sempadan sungai. Perubahan ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan tidak sinkronnya antara perencanaan tata ruang dengan implementasi di lapangan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kawasan sempadan untuk permukiman, usaha informal, maupun kegiatan lain yang justru memperparah degradasi kualitas sungai.

Di sisi lain, potensi Krueng Daroy untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan wisata air berbasis masyarakat sebenarnya sangat besar. Sungai ini dapat menjadi bagian dari identitas kota yang membedakan Banda Aceh dari kota-kota lain, jika dikelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan Krueng Daroy sebagai ruang kota yang hidup dan berdaya guna secara ekologis, ekonomis, dan sosial.

Saran

1. Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan dan Partisipatif

Pemerintah Kota Banda Aceh perlu menyusun rencana tata ruang yang lebih inklusif dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Krueng Daroy harus dimasukkan secara eksplisit dalam rencana tata ruang sebagai koridor ekologis dan ruang publik yang vital. Proses perencanaan harus melibatkan masyarakat lokal, akademisi, dan pihak swasta agar lebih realistis, implementatif, dan berkelanjutan.

2. Revitalisasi dan Penataan Kawasan Sempadan Sungai

Sempadan Krueng Daroy harus ditata ulang melalui program revitalisasi yang mempertimbangkan fungsi ekologis, estetika kota, dan aksesibilitas publik. Ruang-ruang informal di sepanjang sungai perlu ditata atau direlokasi secara humanis, dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi warga yang terdampak.

3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Lingkungan

Diperlukan kebijakan dan regulasi yang lebih tegas dalam melindungi kawasan

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, F. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Bappeda Banda Aceh. (2021). *Evaluasi Implementasi RTRW 2010–2030*. Banda Aceh: Bappeda Kota.
- Bappeda Banda Aceh. (2021). *Laporan Kinerja Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Fadli, M. (2020). Revitalisasi Sungai dan Transformasi Lanskap Kota Banda Aceh. *Jurnal Tata Ruang Aceh*, 8(2), 112–123.
- Forman, R. T. T. (1995). *Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions*. Cambridge University Press.
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan.
- Hudalah, D., & Woltjer, J. (2007). Integrating spatial planning and environmental management in Indonesia: Challenges and opportunities. *International Planning Studies*, 12(3), 267–283.
- Hudalah, D., & Woltjer, J. (2007). Spatial Planning and Urban Resilience in Indonesia. *Urban Studies*, 44(8), 1301–1323.
- Lubis, A. (2022). Ekologi Lanskap Sungai Perkotaan: Studi Kasus Banda Aceh. *Jurnal Lingkungan dan Kota*, 5(1), 45–58.
- Nasution, M. F., & Putri, L. A. (2022). Estetika dan Fungsi Sosial Sungai di Perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 11(1), 78–90.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2018). *Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2018 tentang RTRW 2010–2030*.
- Putri, R. A. (2022). Revitalisasi Sungai Perkotaan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Krueng Daroy. *Jurnal Tata Ruang Aceh*, 5(1), 12–25.
- Rahman, T., & Sari, D. (2020). Infrastruktur Hijau di Kawasan Sungai. *Jurnal Kota Berkelanjutan*, 6(3), 101–110.
- Rasyid, M. (2017). Sungai dan Identitas Budaya di Aceh. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 38(1), 20–30.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.

Jakarta: Sekretariat Negara.

- Syahrial, M., Putra, H., & Latifah, N. (2020). Keterbukaan Informasi dalam Pembangunan Kota. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 55–67.
- Utami, R., & Prasetyo, B. (2021). Ketimpangan Fungsi Ekologis dalam Tata Ruang Kota. *Jurnal Perkotaan Berkelanjutan*, 10(2), 134–146.
- Yuliana, E. (2019). Dampak Limbah Rumah Tangga terhadap Kualitas Air Sungai. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 88–95.
- Yulizar, M. (2020). Sejarah dan Peran Sungai dalam Struktur Kota Banda Aceh. *Jurnal Warisan Budaya Aceh*, 3(2), 88–97.